

## Digadang-gadang Jadi Pj Gubernur, Ini Komentar Heru Budi Hartono

JAKARTA (IM) - Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono menegaskan, masih banyak orang yang lebih baik darinya untuk dipilih menjadi pejabat gubernur DKI Jakarta yang akan menggantikan Anies Baswedan.

Hal ini ditegaskan karena namanya sering dikait-kaitkan dengan pejabat gubernur DKI. "Belum ada pembicaraan ke arah itu, dan masih banyak kandidat yang lebih baik," ujar Heru kepada wartawan, Rabu (18/5).

Heru sendiri pernah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara pada 2014 pada kepemimpinan Gubernur Jokowi. Sedangkan pada era Basuki Tjahaja Purnama (BTP), Heru diaduk menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta. "Ya memang saya berkarir lama di pemda DKI," katanya.

Namun, saat dikonfirmasi apakah dirinya siap jika benar namanya muncul sebagai kandidat Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru tidak mau berandai-andai terlalu jauh. "Aduh, Belum kepikiran

ke arah sana," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan kriteria pengganti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies masa jabatannya habis pada tahun ini 2022.

"Dia harus seorang pejabat pimpinan tinggi madya, jadi dia eselon satu, kita masih dalam tahap menerima masukan. Apakah yang bersangkutan ada masalah atau tidak, kita profiling, apakah potensi ada kasus atau tidak," ujar Tito kepada wartawan di Gedung Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/5).

Tito mengungkapkan bahwa Pejabat (Pj) Gubernur yang akan menggantikan Anies bakal dilantik pada Oktober nanti. Nantinya, tiga calon nama akan diserahkan sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Untuk 3 nama diajukan ke Pak Presiden. Sama yang nanti bulan Oktober (DKI Jakarta) sebulan sebelumnya lah September kita nanti akan sudah dapat nama kita ajukan ke Bapak Presiden," ungkap Tito. ● mei

## Satgas Saber Pungli Ungkap Sebanyak 323 Kepala Daerah Tersandung Korupsi

MEULABOH (IM) - Sekretaris Satuan Tugas Saber Pungli Pusat Republik Indonesia, Irjen Agung Makbul mengungkapkan bahwa hingga Mei 2022 tercatat 323 bupati/wali kota di seluruh Indonesia ditangkap dan ditahan karena terlibat kasus tindak pidana korupsi.

"Terakhir seminggu lalu, Bupati Bogor Ade Yasin. Sehingga total kepala daerah yang tersandung masalah korupsi menjadi 323 orang," katanya di Meulaboh, Selasa (17/5) malam.

Pernyataan ini ia sampaikan saat memenuhi undangan Bupati Aceh Barat Ramli M.S. yang turut dihadiri oleh unsur forkompinda dan pejabat daerah Aceh Barat, di pendapa bupati setempat di Meulaboh.

Agung Makbul mengatakan, begitu gencarnya pemerintah melakukan penegakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan gencarnya dilakukan Saber Pungli, namun sampai saat ini masih saja ada kepala daerah yang tersandung kasus hukum akibat tindak pidana

korupsi. Ia juga mengatakan, tindak pidana korupsi dan pungutan liar merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Guna mencegah adanya kepala daerah atau penyelenggara pemerintahan di Tanah Air terhindar dari praktik korupsi dan pungutan liar, Satgas Saber Pungli Pusat saat ini terus berupaya melakukan berbagai edukasi dan sosialisasi tentang Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Saber Pungli.

"Saber pungli itu pengendalian dan penangan jawabnya Menkopolkum, sehingga atas undangan Bupati Aceh Barat dan seizin Menkopolkum, saya hadir ke Aceh Barat untuk memberikan edukasi dan sosialisasi di Aceh Barat," katanya.

Sosialisasi yang dilakukan pihaknya tersebut untuk menuju zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) di Kabupaten Aceh Barat. ● han

# 2 Polhukam

FOTO:ANT



## Korupsi Minyak Goreng, Operasi Senyap LCW dengan Dirjen Kemendag Terbongkar

LCW ternyata memiliki hubungan khusus dengan eks Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, IWW, yang lebih ditetapkan sebagai tersangka korupsi ekspor CPO.

JAKARTA (IM) - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran LCW, tersangka kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng atau Crude Palm Oil (CPO). Ternyata LCW sering mengikuti rapat-rapat penting di Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Hal ini membuat Kejagung

heran, sebab status yang bersangkutan tak jelas.

"Yang jelas status dia kita enggak tahu di Kemendag sebagai apa, tapi kok dia dilibatkan dalam setiap ada dalam rapat penting CPO," ucap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jam-pidus) Febrie Adriansyah, Rabu (18/5).

Febrie menuturkan, tersangka LCW memiliki hubungan khusus dengan eks Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Indrasari Wisnu Wardhana. Wisnu sendiri terlebih dulu menjadi tersangka dalam kasus ini.

"Kebetulan dia ini kan sudah ada alat bukti diketahui ternyata ada hubungan dengan tersangka Dirjen dalam pengu-rusan CPO, itu yang melawan hukum," jelasnya.

Hal itu, kata Febrie, diketahui dari beberapa alat bukti yang dikumpulkan. Di antaranya, ada bukti rapat virtual zoom yang diikuti serta beberapa bukti transaksi.

"Kita kan dari alat bukti

banyak, kita lihat dari virtual, zoom meeting, kita lihat dari transaksi dia ini sebagai apa, kemudian dia kerja dimana. Ternyata kan dari kerjanya juga sebagai konsultan," ungkapnya.

Sebelumnya, Kejagung kembali menetapkan satu orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor minyak goreng atau Crude Palm Oil (CPO).

Keputusan Kejagung Ketut Sumedana menjelaskan, penetapan itu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-26/F2/Fd.2/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 dan Surat Penetapan Tersangka (PIDSUS-18) Nomor: TAP-22/F.2/Fd.2/05/2022 tanggal 17 Mei 2022. ● han

"Adapun satu orang tersangka yang dilakukan penanganan yaitu LCW alias WH selaku pihak swasta yang diperbantukan di Kementerian Perdagangan RI," kata Ketut kepada wartawan, Jakarta, Selasa (17/5).

Dalam perkara ini, peran tersangka yaitu bersama-sama dengan tersangka IWW (Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI) mengondisikan pemberian izin Persetujuan Ekspor (PE) di beberapa perusahaan.

"Untuk mempercepat proses penyidikan, tersangka LCW alias WH dilakukan penanganan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak 17 Mei 2022 s/d 05 Juni 2022," ujar Ketut. ● han

## PBNU Dukung Jaksa Agung Melarang Terdakwa Pakai Atribut Keagamaan saat Sidang

JAKARTA (IM) - Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi mendukung Jaksa Agung ST Burhanuddin yang melarang semua terdakwa menggunakan atribut keagamaan secara mendadak disaat persidangan.

Menurutnya atribut keagamaan sebaiknya tidak dijadikan kedok dan merusak imej agama tertentu.

"Ya, saya kira memang sebaiknya demikian agar simbol agama tidak menjadi asesoris saat persidangan saja," kata pria yang akrab disapa Gus Fahrur kepada wartawan, Rabu, (18/5).

Namun larangan tersebut

lanjut Gus Fahrur tidak berlaku bagi terdakwa yang memang sejak lama menggunakan atribut keagamaan.

"Sebaliknya kalau dia me-

ng dia seorang guru misalnya, yang memang biasa pakai batik dan kopyah ya jangan dipaksa pakai kaos dan celana pendek selutut," ujarnya.

Dia juga sepakat jika larangan itu diberlakukan kepada terdakwa yang mendadak mengenakan atribut agama saat berada di persidangan. Misalnya ada terdakwa kasus prostitusi atau suap korupsi yang sebelumnya tidak menggunakan hijab yang tiba-tiba memakai gamis dan jilbab saat sidang digelar. "Bukan sekedar pencitraan mendadak saleh," kata Gus Fahrur.

Kendati demikian, Gus Fahrur tetap menyerahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung dalam pembuatan aturan khusus pakaian terdakwa yang mendadak mengena-

kan atribut keagamaan.

"Namun sebaiknya tidak kaku atau sesuai asas kepatutan saja," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin akan menerbitkan edaran ke seluruh jajarannya terkait larangan seluruh terdakwa yang mendadak menggunakan atribut keagamaan saat menjalani persidangan.

Jaksa Agung geram terhadap adanya sejumlah terdakwa yang tiba-tiba menggunakan atribut keagamaan dalam menjalani persidangan ketika menghadapi proses meja hijau.

Dalam hal ini, edaran tersebut diharapkan dapat menghindari kesan bahwa tindak pidana hanya dilakukan oleh suatu pemilik agama tertentu. ● mar



FOTO:ANT

## PENGHAPUSAN SYARAT TES COVID-19 BAGI PELAKU PERJALANAN

Sejumlah calon penumpang pesawat berjalani di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (18/5). Pemerintah menghapus syarat tes COVID-19 bagi pelaku perjalanan domestik dan luar negeri bagi yang telah divaksin dosis lengkap yang berlaku efektif mulai Rabu (18/5/2022).

## MKD DPR Panggil Harvey Malaihollo Terkait Dugaan Nonton Video Porno

JAKARTA (IM) - Mahkamah Khormatan Dewan (MKD) DPR akan memanggil anggota Komisi IX DPR Harvey Malaihollo pada Kamis (19/5) hari ini, untuk meminta klarifikasi terkait dugaan menonton video porno saat rapat.

"Kemarin rapat internal yang dilaksanakan secara hybrid memutuskan ada belasan perkara termasuk Saudara HM yang akan dilakukan pemanggilan klarifikasi," kata Wakil Ketua MKD Habiburrokhman kepada wartawan, Rabu (18/5).

Habiburrokhman mengatakan, selain Harvey, MKD akan memanggil pengadu dalam kasus ini pada hari yang sama. Politikus Partai Gerindra tersebut menegaskan, setiap aduan yang diterima oleh MKD akan ditindaklanjuti.

"Intinya kami perlu disampaikan bahwa semua pengaduan yang masuk akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Habiburrokhman.

Sebelumnya, seorang ang-

gota DPR tertangkap kamera diduga tengah menonton video porno saat rapat. Belakangan, diketahui bahwa sosok anggota DPR itu adalah anggota dewan dari Fraksi PDI-P, Harvey Malaihollo.

Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto mengungkapkan, Harvey sudah memberi klarifikasi kepada Fraksi PDI-P terkait kasus menonton video porno tersebut. Bambang mendukung, Harvey sengaja difoto dari balkon ruang rapat ketika ia membuka pesan masuk aplikasi Whatsapp yang ternyata berupa video porno.

"Ini bagian dari jebakan, nanti difoto dari atas. Dikatakan orang nonton video (porno). Kan begitu," kata Bambang, beberapa waktu lalu.

"Kita merasa bukan mau menyalahkan, ini kan kawan kita menerima WA, yang kita klarifikasi dengan fraksi, menerima WA. WA dibuka refleksi ternyata ada video itu. Video dibuka isinya itu difoto di atas," katanya. ● han



FOTO:ANT

## EXECUTIVE BRIEFING PROGRAM POLITIK CERDAS BERINTEGRITAS TERPADU

Ketua KPU Hasyim Asyari (kedua kanan), Ketua KPK Firli Bahuri (kedua kiri), Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (kiri) dan Irjen Kemendagri Tumpak Haposan (kanan) memberikan keterangan pers pada acara Executive Briefing Politik Cerdas Berintegritas Terpadu (PCB) Terpadu di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (18/5). Program Politik Cerdas Berintegritas Terpadu yang diikuti 20 partai politik dan digelar menjelang pesta demokrasi itu bertujuan untuk membawa khasanah baru perpolitikan di Indonesia yang lebih bersih, beretika dan bebas dari korupsi.

**PENGUMUMAN PENGAMBIL ALIHAN SAHAM**  
Berdasarkan Notulen Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT ONE WORLD INTERNATIONAL EXPORT IMPORT LEUSER ACEH NUSANTARA, berkedudukan di Jakarta Timur, tanggal 13 Mei 2022, telah diputuskan menyetujui pengalihan sebagian besar saham Perseroan kepada Phak Kotiga, selubung dengan hal tersebut apabila ada pihak-pihak yang keberatan silahkan menghubungi Direksi Perseroan, pengumuman ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  
Jakarta, 18 Mei 2022  
Direksi  
TAMER ABDELKAREM SALEH MOHAMED

**PENGUMUMAN**  
Dengan ini mengumumkan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT TRIBAL SUKSES MANDIRI, berkedudukan di Jakarta Barat (Perseroan), yang dimat dalam akta tertanggal 12 Mei 2022, dibuat dihadapan KIRANA IVYMINERVA WILAMARTA, Sarjana Hukum, Master of Laws, Notaris di Jakarta, telah diputuskan untuk membubarkan Perseroan dan menunjuk Tuan ANDRIAN PAULINE HUSEIN selaku likuidator Perseroan.  
Bagi Kreditor dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan dan bukti-bukti yang mendukung kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak pengumuman ini dimuat, dengan alamat:  
Jakarta, 19 Mei 2022  
Likuidator  
PT TRIBAL SUKSES MANDIRI

**PENGUMUMAN**  
Untuk memenuhi Ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT MAJU SEJAHTERA ABADITAMA, berkedudukan di Jakarta Timur ("Perseroan"), mengumumkan Ny. DEWI LUMBING RAJA akan mengambil alih sebagian besar saham Perseroan, secara langsung dari pemegang saham, sehingga mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan.  
Kreditor Perseroan dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari setelah tanggal pengumuman ini, dengan menghubungi:  
PT MAJU SEJAHTERA ABADITAMA  
Jakarta Garden City  
Rukan Avenue No. 8-086, Jl. Raya Cakung Ciilinging Kilometer 0,5, Kel. Cakung Timur, Kec. Cakung, Jakarta Timur  
Apabila setelah lewat 14 hari, maka keberatan tidak dapat diterima.  
Jakarta, 16 Mei 2022  
Direksi PT Maju Sejahtera Abaditama

**PENGUMUMAN**  
Dengan ini diumumkan bahwa:  
PT. Pasifik Tehnikindo International, berkedudukan di Kota Tangerang, bermaksud mengalihkan seluruh saham milik Hendrawanto, Rizka Melati Karunia, dan Adrian Wijaya dalam Perseroan kepada:  
Daddy Chandra Wardana tinggal di Kota Bekasi, Satrya Gautama Putra tinggal di Jakarta Selatan, Muhammad Farras Widyaputra tinggal di Kabupaten Bogor dan Shanika Karin Fitrija tinggal di Kota Tangerang Selatan;  
Segala keberatan dapat diajukan kepada Perseroan.

## Geledah Ruang Kerja, Penyidik KPK Sita Catatan Aliran Uang Wali Kota Ambon

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita catatan aliran uang Wali Kota Ambon ketika melakukan pengecekan di ruang kerjanya pada Selasa (17/5).

Pengecekan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan suap persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel Alfamidi tahun 2020 di Kota Ambon.

Lokasi yang digeledah yakni, ruang kerja Wali Kota Ambon yang kini berstatus tersangka, Richard Louhenapessy (RL). Kemudian ruang kerja sekretariat Wali Kota Ambon, ruang kerja Kepala Dinas serta Sekretariat Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; ruang kerja Kepala Dinas dan staf kantor Dinas Perhubungan.

Selanjutnya, ruang kerja Kepala Dinas dan staf kantor BPKAD; serta beberapa ruangan kerja di kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Lokasi yang digeledah tersebut terletak di perkantoran Pemkot Ambon, pada gedung A, gedung B, gedung C dan gedung D.

"Tim penyidik telah selesai melaksanakan upaya paksa pengecekan di beberapa lokasi di wilayah Kota Ambon yang berada di lingkungan perkantoran Pemkot Ambon, pada gedung A, gedung B, gedung C dan gedung D," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (18/5).

KPK berhasil mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan perkara ini dalam pengecekan tersebut. Sejumlah barang yang berhasil diamankan yakni, dokumen catatan aliran keuangan. KPK bakal menganalisa barang-barang tersebut untuk selanjutnya dilakukan penyitaan.

"Pada beberapa lokasi dimaksud, ditemukan dan diamankan berbagai bukti di antaranya sejumlah dokumen terkait keuangan termasuk catatan aliran sejumlah uang dan bukti alat elektronik," terangnya.

Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel atau gerai minimarket di wilayahnya. Richard Louhenapessy juga ditetapkan sebagai tersangka penerimaan gratifikasi lainnya.

Selain Richard Louhenapessy, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya yakni, Staf Tata Usaha Pimpinan pada Pemkot Ambon, Andrew Erin Hehanussa (AEH) dan Karyawan AlfaMidi Kota Ambon, Amri (AR).

Richard diduga aktif berkomunikasi dan melakukan pertemuan dengan Amri terkait dengan proses pemberian persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel Alfamidi di Kota Ambon. Dalam berbagai pertemuan, Amri diduga kerap meminta kepada Richard agar proses perizinannya bisa segera disetujui dan diterbitkan.

Menindaklanjuti permohonan Amri, Richard Louhenapessy kemudian memerintahkan Kadis PUPR Pemkot Ambon untuk segera memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin yang diminta Amri. Di antaranya, Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Untuk setiap dokumen izin yang disetujui dan diterbitkan, Richard Louhenapessy diduga meminta agar penyerahan uang dengan minimal nominal Rp25 juta menggunakan rekening bank milik Andrew Erin Hehanussa yang adalah orang kepercayaan Richard.

Sementara itu, khusus untuk penerbitan terkait persetujuan izin prinsip pembangunan 20 gerai usaha ritel, Amri diduga kembali memberikan uang kepada Richard sekira sejumlah Rp500 juta. Uang itu diberikan secara bertahap melalui rekening bank milik Andrew Erin Hehanussa. Richard diduga juga menerima aliran sejumlah dana dari berbagai pihak sebagai gratifikasi. ● mei